

DATABASE INOVASI DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2020

Bidang Penelitian dan Pengembangan
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Malang
email: litbangkotamlg@gmail.com

Abstrak: Masa depan inovasi daerah merupakan isu krusial yang mulai muncul sejak lima tahun awal pelaksanaan otonomi daerah. Inovasi merupakan salah satu pilar penting untuk meningkatkan daya saing kinerja pemerintahan. Tujuan utama dari penelitian ini adalah mengetahui keberlanjutan inovasi daerah Kota Malang. Guna mencapai tujuan tersebut, penelitian ini menggunakan metode analisis observasional (*observational analysis*). Hasil studi ini menunjukkan dari ke-13 inovasi yang digagas oleh 12 Perangkat Daerah (PD), sebanyak 9 inovasi yang mengalami perkembangan (*blooming*), dan 4 inovasi stagnan (tidak berkembang). Studi ini mengidentifikasi penghambat berkembangnya inovasi daerah Kota Malang diantaranya; Pertama, rendahnya tingkat ketersediaan alokasi anggaran yang memadai dan pengelolaan dan pertanggungjawaban anggaran yang masih terbatas. Kedua, konsistensi dalam mengembangkan SDM pengelola inovasi masih rendah. Ketiga, minimnya pemanfaatan data, informasi, dan pengetahuan terkait kinerja inovasi. Keempat, tidak tersedianya unit khusus yang didedikasikan untuk terus mengembangkan inovasi. Kelima, aspek legal formal yang menjamin keberlangsungan inovasi belum tersedia.

Kata Kunci : inovasi daerah, database, dan keberlanjutan

Abstract: *The future of regional innovation is a crucial issue that has emerged since the first five years of the implementation of regional autonomy. Innovation is one of the important pillars to increase the competitiveness of government performance. The main objective of this study is to determine the sustainability of regional innovation in Malang City. In order to achieve this goal, this study uses an observational analysis method. The results of this study show that of the 13 innovations initiated by 12 Regional Apparatus (PD), 9 innovations have bloomed, and 4 have stagnated (not developed). This study identifies the obstacles to the development of regional innovation in Malang City, including; First, the low level of availability of adequate budget allocations and limited budget management and accountability. Second, consistency in developing human resources managing innovation is still low. Third, the minimal use of data, information and knowledge related to innovation performance. Fourth, there is no special unit dedicated to continuously developing innovation. Fifth, the formal legal aspect that guarantees the continuity of innovation is not yet available.*

Keywords: *regional innovation, database, and sustainability*

PENDAHULUAN

Pergeseran paradigma pembangunan setelah reformasi tahun 1998 terus mengalami penyempurnaan. Kini, Pemerintah Daerah memiliki wewenang penuh untuk mengurus sendiri daerahnya menurut asas otonomi daerah yang diharapkan akan membawa dampak yang signifikan bagi masyarakat. Wewenang Pemerintah Daerah untuk mengurus sendiri daerahnya menurut asas otonomi memiliki landasan hukum dimulai dengan diterbitkannya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999, kemudian diubah menjadi Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 dan disempurnakan lebih jauh di dalam

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014.

Untuk mencapai kualitas keputusan dan tindakan Pemerintah Daerah yang efektif dan efisien dibutuhkan upaya yang serius melalui terobosan inovatif. Inovasi Daerah menjadi hal penting yang dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah agar dampaknya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal. (Taufik, 2005).

Secara umum dalam penyelenggaraan inovasi pelayanan publik oleh pemerintah daerah mengacu pada seperangkat peraturan dan perundang-undangan yakni: Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa, “Dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan inovasi (Pasal 386)”.

Dalam konteks inovasi daerah UU tersebut diterjemahkan ke dalam Peraturan Pemerintah No 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah. Selain itu berdasarkan Pasal 388 ayat (7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 22 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah ditegaskan bahwa kepala daerah melaporkan inovasi daerah kepada Menteri Dalam Negeri.

Inovasi merupakan salah satu pilar penting untuk meningkatkan daya saing adalah inovasi. Untuk mewujudkan hal tersebut, inovasi harus didukung oleh beberapa hal antara lain kualitas institusi riset, dana riset, serta kolaborasi universitas dan industri. Berangkat atas hal ini Pemerintah Kota Malang melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melakukan Penyusunan Database guna mendorong tumbuh dan berkembangnya inovasi daerah di Kota Malang.

Selanjutnya penelitian ini juga ditujukan untuk melihat bagaimana keberlanjutan inovasi daerah di Kota Malang. Secara spesifik dalam studi ini konsep inovasi daerah dan keberlanjutan inovasi digunakan sebagai pisau analisis untuk menggambarkan secara komprehensif bagaimana inovasi yang berlangsung di Kota Malang.

METODE

Tujuan utama dari penelitian ini adalah mengetahui keberlanjutan inovasi daerah Kota Malang. Guna mencapai tujuan tersebut, penelitian ini menggunakan metode analisis

observasional (*observational analysis*).

Alasannya, *state of the art* studi ini terletak pada kajian politik kreatif dan/atau kewirausahaan politik. Secara umum, studi ini meneliti tentang praktik kepemimpinan inovasi. Secara epistemologis, studi-studi kepemimpinan inovasi masuk dalam kajian kepemimpinan politik. Studi ini memiliki pilihan metodologis yang beragam sesuai dengan tujuan dan substansi yang diteliti. Gains (dalam t’Hart dan Rhodes (eds.), 2014:2) menjelaskan pilihan perspektif analisis dan metodologi yang sesuai untuk studi kepemimpinan inovasi yang berupaya memahami pelaksanaan kreatifitas dalam praktik kepemimpinan.

Gains (dalam t’Hart dan Rhodes (eds.), 2014:1) menjelaskan bahwa di antara beragam perspektif analisis dan metodologi dalam studi kepemimpinan politik, analisis observasional (*observational analysis*) merupakan perspektif paling tepat digunakan dalam studi ini. Alasannya, analisis observasional memungkinkan peneliti untuk menyediakan deskripsi yang tebal (*thick description*) mengenai pemimpin politik dan keputusan yang dibuatnya.

Gains (2014:2) mengutip penjelasan Hammersley dan Atkinson (2007) bahwa analisis observasional merupakan bagian dari (*associated*) pendekatan konstruktivis dan interpretif dengan nalar induktif. Melalui pendekatan ini, observasi dinilai mampu mengungkap keberlanjutan inovasi dan dunia disekitar inovasi yang diobservasi.

Dalam studi politik, observasi merupakan salah satu pilihan metodologis dalam penelitian kualitatif (Harrison, 2001:80).

Maka, studi ini secara keseluruhan konsisten dengan penelitian kualitatif yang memfokuskan pada pemaknaan dan interpretasi fenomena sosial dan proses sosial (politik kreatif) dalam satu konteks di lokasi praktiknya (Maggie Sumner dalam Jupp, 2006:248).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan ditemukan adanya 13 inovasi daerah yang telah diimplementasikan oleh keseluruhan Perangkat Daerah di Kota Malang. Secara umum inovasi yang digagas terbagi ke dalam dua sektor utama yaitu pendidikan dan kesehatan.

Terdapat 12 Perangkat Daerah yang mengimplementasikan sekaligus mengembangkan inovasi tersebut diantaranya: SDN 02 Sukun, SDN 05 Sawojajar, SMP Negeri 10, SMPN 18, SMPN 15, SMPN 1, SMPN 6, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang, Puskesmas Mulyorejo, Puskesmas Kendalkerep, Puskesmas Polowijen, dan Puskesmas Mojolangu. Inovasi dari masing-masing Perangkat Daerah tersebut digambarkan dalam Tabel 1.

BatMan (Barcode Tanaman) merupakan sebuah inovasi yang dikembangkan oleh SDN 02 Sukun Kota Malang. Program ini awalnya didorong dari adanya lomba Adhiwiyata, para tim dari SDN 02 Sukun mengumpulkan guru-guru yang biasanya memunculkan ide-ide kreatif di zaman teknologi saat ini. Selain itu SDN 02 Sukun juga baru saja mendapatkan penghargaan Adhiwiyata Tingkat Provinsi.

Pada awalnya nama-nama masing-masing tanaman diberi kode dengan kertas yang diberi kode, namun ternyata dari sisi kualitas dan massa itu terbatas. Berangkat dari permasalahan itu, para anggota tim memikirkan ide bagaimana agar ide sebelumnya dapat berkembang menjadi menarik, simpel, kualitas terjaga, dan dapat dikenal banyak orang. Sehingga dari hal tersebut adek-adek muda memunculkan ide untuk membuat *barcode* tanaman.

Sedasa Gangsal Alon merupakan sebuah inovasi yang dimiliki oleh SDN 05 Sawojajar. Sedasa Gangsal Alon merupakan inovasi pada metode pembelajaran siswa di SDN 05 Sawojajar

dengan memanfaatkan aplikasi-aplikasi digital yang ada. Aplikasi-aplikasi digital yang dimanfaatkan dalam metode pembelajaran siswa diantaranya, ialah: *Kahoot*, *Quizizz*, *Deep Quiz*, *Google Classroom*, *Google Form*, *Worldwall*.

Tabel 1. Inovasi Daerah Kota Malang

No	Instansi/OPD	Inovasi
1.	SDN 02 Sukun	BATMAN (Barcode Tanaman)
2.	SDN 05 Sawojajar	SEDASA GANGSAL ALON (Sekolah Dasar Sawojajar 5 Aplikasi Online)
3.	SMP Negeri 10	SEGAR KAGEMI (Semua Segar dengan Kantin Gemar Makan Ikan)
4.	SMPN 18	TONGSIS (Kantong Sampah Siswa)
5.	SMPN 15	SAGARA MELALUI NAN DULUR
6.	SMPN 1	PTS UNTUK PRONAS
7.	SMPN 6	SIMANTAP (Sistem Informasi Masyarakat Nyata dan Pasti)
8.	DISDIKBUD	SIDARLING (Sekolah Idaman Sadar Lingkungan) & ULTRAS (Unggul dan Transparan)
9.	Puskesmas Mulyorejo	DONAT (Donasi Jelantah)
10.	Puskesmas Kendalkerep	SRIKANDI SETARA (Srikandi Pemantau Seminggu Sekali Tablet Tambah Darah)
11.	Puskesmas Polowijen	PAIMUN (Panpan Ingat Imunisasi)
12.	Puskesmas Polowijen	RUMAH DIAPERS (Klinik Pengolahan)
13.	Puskesmas Mojolangu	GEMAS SI KELING

Sumber: diolah, (2020)

Kantin Sehat SEGAR KAGEMI (Sehat Bugar Kantin Gemar Makan Ikan) merupakan inovasi yang dikembangkan oleh SMPN 10 Kota Malang. Inovasi SEGAR KAGEMI awalnya dibuat untuk membudayakan siswa dalam makan ikan. Seiring berjalannya, SEGAR KAGEMI tidak hanya menekankan siswa untuk makan ikan saja. Untuk inovasi kantin gemar makan ikan tidak melulu penekannya untuk makan ikan saja. Awalnya 2013, pengembangan dari kantin sehat yang bebas dari 5P (Pengawet, Pengenyal, Pemanis, Perasa, dan Pemanis buatan).

Pada 2014, SMPN 10 mencanangkan bebas KMP (Kertas, Minyak, Plastik) dalam pembuatannya. Sampai 2016, SMPN 10 berinovasi kembali sejalan dengan himbuan dari Menteri KKP Ibu. Akhirnya, SMP 10 mencanangkan awal agustus 2016 untuk menghubungi pihak Sendang Biru untuk bekerja sama.

TONGSIS (Kantong Sampah Siswa) merupakan inovasi yang dikembangkan oleh SMPN 18 Kota Malang. Ide inovasi ini muncul pada tahun akhir 2017 atau awal 2018 diusung oleh anak murid sendiri yang pernah mengikuti diklat GEN SALIM (Generasi Sadar Iklim) selama satu bulan. Setelah mengikuti diklat, mereka terjun ke sekolah dan melihat kondisi sekolah mengenai sampah anorganik (kertas, bungkus kertas makanan, dll) yang belum terbuang ke tempat sampah, anak-anak memiliki ide untuk sampah yang belum terbuang ke tong sampah, anak-anak mencoba untuk mengambil dengan cepat tanpa harus membuang ke tempat sampah besar.

Inovasi SAGARA melalui Nan Dulur merupakan salah satu inovasi yang dimiliki oleh SMPN 15 Malang. SAGARA melalui Nan Dulur merupakan singkatan dari Sekolah Sahabat Keluarga dan Ramah Anak melalui Layanan Daring dan Luring. Inovasi ini merupakan jenis inovasi digital dan non-digital yang berfokus pada layanan publik dan merupakan sebuah inovasi yang

berkelanjutan untuk mewujudkan sekolah sahabat keluarga dan ramah anak.

PTS Untuk PRONAS (Peran Teman Sebaya Untuk Program Zonasi) merupakan salah satu program inovasi yang lahir dan dikembangkan oleh SMP Negeri 1 Kota Malang. Inovasi ini hadir atas dasar sebagai respon atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 14 tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan menggunakan sistem zonasi.

SIMANTAP (Sistem Informasi Masyarakat Nyata dan Pasti) merupakan salah satu sistem informasi yang dibuat SMP 6 Malang yang memberikan akses kepada masyarakat khalayak umum khususnya orangtua siswa yang isinya menjelaskan program sekolah, fasilitas sekolah, kurikulum, prestasi sekolah, penggunaan anggaran. Gagasan itu muncul karena ada perlombaan.

SIMANTAP (Sistem Informasi Masyarakat Nyata dan Pasti) merupakan salah satu sistem informasi yang dibuat SMP 6 Malang yang memberikan akses kepada masyarakat khalayak umum khususnya orangtua siswa yang isinya menjelaskan program sekolah, fasilitas sekolah, kurikulum, prestasi sekolah, penggunaan anggaran. Gagasan itu muncul karena ada perlombaan.

Inovasi DONAT (Donasi Jelantah) pertama kali dikembangkan oleh Puskesmas Mulyorejo. Awal inovasi ini untuk Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) ada 5 pilar, sedangkan di Kota Malang sendiri belum ada kelurahan yang sudah ber-STBM atau dengan kata lain 5 pilar tersebut sudah tercover semuanya. Namun untuk pilar pertama yaitu stop buang air besar sembarangan sudah dinyatakan selesai.

Selanjutnya Puskesmas Mulyorejo berupaya untuk meningkatkan cakupan STBM, salah satunya pada pilar kelima untuk pengolahan limbah cair rumah tangga yaitu limbah minyak goreng atau yang biasa orang Jawa kenal dengan Jelantah.

Srikandi Setara merupakan sebuah inovasi yang dimiliki oleh Puskesmas Kendalkerep. Srikandi Setara merupakan singkatan dari Srikandi Pemantau Seminggu Sekali Tambah Darah. Inovasi ini merupakan jenis inovasi non-digital yang berfokus pada pemberian tablet tambah darah pada remaja putri. Melihat data di lapangan yang menunjukkan angka anemia pada ibu hamil masih cukup banyak, Puskesmas Kendalkerep memiliki program untuk mencegah anemia pada remaja putri dengan mengonsumsi tablet tambah darah setiap minggunya. Maka dari itu, target dari inovasi ini ialah remaja putri yang sudah memasuki masa menstruasi.

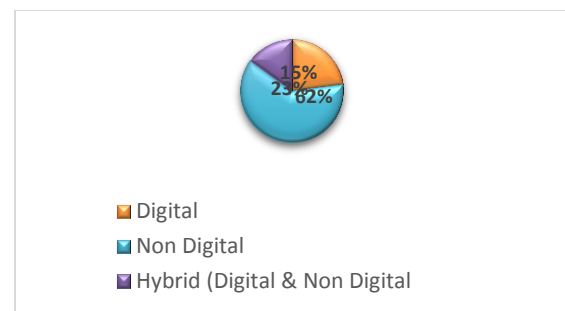
PAIMUN (Papan Ingot Imunisasi) merupakan salah satu program inovasi yang berasal dari Puskesmas Polowijen. Program ini lahir ditengah-tengah ketidaktahuan arah oleh pihak Puskesmas untuk memulai membidik target dalam sebuah program. Hal ini didasarkan atas fakta bahwa Puskesmas Polowijen baru dijadikan sebagai puskesmas pada tahun 2017 yang di mana sebelumnya merupakan rumah bersalin. Perbedaan mendasar yang dapat dirasakan oleh “puskesmas baru” ini ialah bagaimana tanggung jawab yang diemban.

Puskesmas Polowijen baru berdiri pada tahun 2017 yang di mana sebelumnya merupakan rumah sakit bersalin, maka terdapat agenda setiap tahunnya yang dilakukan. Adapun salah satu agendanya ialah dilakukannya Survey Mawas Diri (SMD). Survey ini ditujukan untuk mencari permasalahan apa yang ada di lingkungan sekitar sehingga pihak Puskesmas Polowijen dapat mengetahui terkait upaya yang bagaimana untuk menanggulangi permasalahan tersebut sehingga upaya kesehatan masyarakat bahkan upaya kesehatan perorangannya sesuai dengan apa yang masyarakat butuhkan.

Pada Februari 2017, muncul masalah yang sama di dua kelurahan; yakni banyaknya sampah popok atau diapers di

Kali. Akhirnya ditemukan solusinya dengan cara penyuluhan terkait buang air besar dan bagaimana tata cara pembuangannya. Gemas Si Keling (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Bersama Kelurahan Siaga Keliling) merupakan sebuah inovasi yang dikembangkan oleh Puskesmas Mojolangu. Program ini awalnya merupakan konsep yang mengaktifkan kelurahan siaga, kelurahan siaga ini adalah salah satu UKBM yang ada di wilayah kerja puskesmas Mojolangu, UKBM adalah Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat.

Secara umum ke-13 inovasi diatas terbagi menjadi dua kategori yaitu: inovasi layanan dan inovasi produk. Dari aspek oprasional jenis inovasi yang dilaksanakan adalah digital, non-digital, dan *hybrid* (digital dan non-digital).

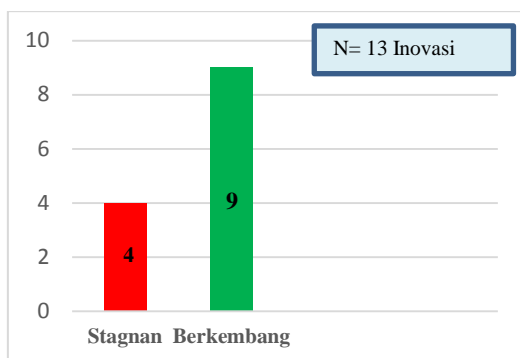


Gambar 1. Jenis Inovasi Berdasarkan Aspek Operasional

Sumber: diolah, (2020)

Merujuk pada data di atas, dari 13 inovasi daerah pemenang yang dinilai unggul dalam kompetisi yang diselenggarakan BAPPEDA Kota Malang tahun 2019, jenis inovasi non-digital masih mendominasi. *Persentase* inovasi non digital sebesar 62 persen, digital sebesar 28 persen dan inovasi *hybrid* yang menggabungkan sistem digital dan non digital secara bersamaan dalam pelaksanaannya sebesar 15 persen. Sistem oprasionalisasi inovasi yang berlangsung menjadi salah satu variabel yang mempengaruhi keberlanjutan inovasi.

Sejak lima tahun pertama pelaksanaan otonomi daerah, masa depan inovasi menjadi isu krusial yang mendapat perhatian khusus. Perhatian khusus ini berangkat dari nilai utama dari inovasi yaitu inovasi tidak hanya berhenti pada bagaimana inovasi digagas dan diimplementasikan. Namun lebih dari itu bagaimana evaluasi atas keberlanjutan inovasi menjadi satu kesatuan yang harus dilihat secara utuh. Selanjutnya, bagaimana perkembangan inovasi daerah di Kota Malang digambarkan melalui Grafik berikut:



Gambar 2. Perkembangan Inovasi Daerah Kota Malang

Sumber: diolah, (2020)

Hasil studi ini menunjukkan dari ke-13 inovasi yang digagas oleh 12 Perangkat Daerah (PD), sebanyak 9 inovasi yang mengalami perkembangan (*blooming*), dan 4 inovasi stagnan (tidak berkembang). Banyak faktor yang kemudian mendeterminasi keberlanjutan inovasi di Kota Malang. Faktor-Faktor pendorong keberlanjutan inovasi yang digunakan sebagai bagian dari instrumen penelitian ini disusun berdasarkan beberapa pengalaman studi yang berlangsung di Indonesia maupun dunia. Studi JPIP (2012) dan OECD (2017) menjadi rujukan utama dalam merumuskan faktor pendorong keberlanjutan inovasi di Kota Malang. Faktor pendorong inovasi inilah yang kemudian berupaya dikonfirmasi melalui wawancara dan analisis data/dokumen pendukung. Hasil penelitian terkait keterpenuhan faktor keberlanjutan

inovasi ditunjukkan melalui tabel berikut:

Tabel 2. Keterpenuhan Faktor Keberlanjutan Inovasi di Kota Malang

No.	Faktor Keberlanjutan Inovasi	Persentase Keterpenuhan
1.	Inovasi masih/ tidak dibutuhkan oleh pengguna	100 %
2.	Upaya terus-menerus dalam mengembangkan SDM pengelola inovasi	62%
3.	Alokasi anggaran yang memadai untuk membiayai keberlanjutan inovasi	46%
4.	Pengelolaan dan pertanggungjawaban anggaran yang mendukung inovasi untuk terus berkembang/tumbuh	54%
5.	Unit khusus yang didedikasikan untuk terus mengembangkan inovasi	69%
6.	Strategi manajemen risiko	85%
7.	Pemanfaatan data, informasi, pengetahuan terkait kinerja inovasi	54 %
8.	Regulasi yang menjamin keberlangsungan inovasi	69%
9.	Kepemimpinan pro-inovasi	92%
10.	Inovasi masih/ tidak dibutuhkan oleh pengguna	100 %
11.	Upaya terus-menerus dalam mengembangkan SDM pengelola inovasi	62%

Sumber: Hasil wawancara dan analisis dokumen, (2020)

Melalui persentase yang tersedia pada tabel di atas diketahui bahwa keseluruhan inovasi (13) masih dibutuhkan keberadaannya oleh pengguna layanan. Kemudian hanya terdapat 62 persen inovasi yang konsisten dalam mengembangkan SDM pengelola inovasi. Alokasi anggaran yang memadai untuk keberlanjutan inovasi memiliki persentase terendah dari keseluruhan faktor keberlanjutan inovasi, persentasenya hanya mencapai 46 persen. Hal ini mengindikasikan rendahnya *sense of budgeting* dalam pengelolaan inovasi. Kecilnya persentase alokasi anggaran juga diikuti oleh rendahnya pengelolaan dan pertanggungjawaban anggaran yang mendukung tumbuh dan berkembangnya

inovasi, persentasenya hanya sebesar 54 persen.

Selanjutnya tidak semua inovasi memiliki unit khusus yang didedikasikan untuk pengembangan inovasi, hanya terdapat 69 persen inovasi yang memiliki unit/ tim khusus. Strategi manajemen risiko sudah dilakukan oleh 85 persen inovasi. Tingginya ketersediaan manajemen risiko tidak berbanding lurus dengan tingkat pemanfaatan data, informasi dan pengetahuan terkait kinerja inovasi. Hanya 54 persen inovasi pemenang kompetisi inovasi pelayanan publik Kota Malang tahun 2019 yang memanfaatkan data/ inovasi sebagai basis pengembangannya.

Bahkan lebih jauh diketahui data/informasi yang berkaitan dengan kinerja inovasi belum terkelola dan terdokumentasi dengan baik. Hanya sebesar 69 persen inovasi yang memiliki legalitas dalam keberlangsungannya. Terakhir, kepemimpinan pro-inovasi. Studi ini menunjukkan tingginya tingkat keberpihakan pemimpin terhadap inovasi. Sembilan puluh dua persen informan menyatakan bahwa pemimpinnya sangat pro terhadap inovasi. Temuan menarik muncul dalam studi ini, hasil studi menunjukkan tidak ada korelasi antara kepemimpinan yang pro-inovasi terhadap keberlanjutan inovasi. Karena dari keempat inovasi yang mengalami stagnasi semuanya menyatakan adanya keberpihakan pemimpin dalam keberlangsungan inovasi.

Temuan lain justru membuktikan adanya interdependensi antara jenis inovasi berdasarkan aspek operasionalnya dengan keberlanjutan inovasi. Rata-rata inovasi yang mengalami stagnasi operasionalnya masih berlangsung secara konvensional (non-digital), sistem yang dijalankan inilah yang kemudian menjadi kendala dalam keberlangsungan inovasi. Sebagian besar inovasi jenis non-digital mengalami kesulitan untuk dapat beradaptasi terutama di masa pandemi seperti saat ini.

Walaupun memang tidak menutup kemungkinan hambatan dalam keberlanjutan inovasi juga terjadi pada inovasi jenis digital maupun *hybrid*. Kemungkinan ini akan muncul ketika tidak ada pengawalan, evaluasi dan pengembangan terhadap aplikasi/layanan yang dihadirkan.

Studi yang dipublikasi OECD (2019:165) mengungkap adanya dua faktor lain yang dinilai penting mendorong lahir dan berkembangnya inovasi yaitu: pentingnya eksperimen (uji coba) inovasi dan pelibatan warga dalam tahapan inovasi. Merujuk pada studi ini maka dilakukan analisis terhadap uji coba dan pelibatan warga dalam tahapan inovasi pada 13 inovasi pemenang kompetisi inovasi pelayanan publik Kota Malang 2019. Hasilnya menunjukkan 92 persen PD melakukan uji coba terhadap masing-masing inovasi. Berikutnya didapati ke-13 inovasi (100 persen) melibatkan warga/ stakeholder dalam tahapan inovasi.

Walaupun persentase uji coba dan pelibatan masyarakat dalam tahapan inovasi tinggi bahkan hampir sempurna namun tetap ada inovasi yang stagnan. Dengan ini diidentifikasi penghambat berkembangnya inovasi daerah Kota Malang diantaranya; Pertama, rendahnya tingkat ketersediaan alokasi anggaran yang memadai, serta pengelolaan dan pertanggungjawaban anggaran yang masih terbatas. Kedua, konsistensi dalam mengembangkan SDM pengelola inovasi masih rendah. Ketiga, minimnya pemanfaatan data, informasi, dan pengetahuan terkait kinerja inovasi. Keempat, tidak tersedianya unit khusus yang didedikasikan untuk terus mengembangkan inovasi. Kelima, legal formal yang menjamin keberlangsungan inovasi belum tersedia.

KESIMPULAN

Dalam rangka meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah, pada tahun 2019 Pemerintah Kota

Malang menggelar Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik pada Perangkat Daerah dan Unit Kerja. Kompetisi ini kemudian melahirkan inovasi-inovasi unggul, baru, dan bermanfaat Inovasi-inovasi tersebut terdiri dari dua sektor utama yaitu pendidikan dan kesehatan. Secara umum kategori inovasi yang berlangsung terbagi menjadi dua yaitu inovasi layanan dan inovasi produk. Dari aspek oprasional jenis inovasi yang dilaksanakan adalah digital, non digital, dan *hybrid* (digital dan nondigital).

Hasil studi ini menunjukkan dari ke-13 inovasi yang digagas oleh 12 Perangkat Daerah (PD), sebanyak 9 inovasi yang mengalami perkembangan (*blooming*), dan 4 inovasi stagnan (tidak berkembang). Beberapa faktor mendeterminasi keberlanjutan inovasi di Kota Malang. Identifikasi faktor-faktor pendorong keberlanjutan inovasi yang digunakan sebagai bagian dari instrumen penelitian ini disusun berdasarkan beberapa pengalaman studi yang berlangsung di Indonesia maupun dunia. Studi JPIP (2012) dan OECD (2017) menjadi rujukan utama dalam merumuskan faktor pendorong keberlanjutan inovasi di Kota Malang.

Keseluruhan inovasi (13) masih dibutuhkan keberadaannya oleh pengguna layanan. Kemudian hanya terdapat 62 persen inovasi yang konsisten dalam mengembangkan SDM pengelola inovasi. Alokasi anggaran yang memadai untuk keberlanjutan inovasi memiliki persentase terendah dari keseluruhan faktor keberlanjutan inovasi, persentasenya hanya mencapai 46 persen. Hal ini mengindikasikan rendahnya *sense of budgeting* dalam pengelolaan inovasi. Kecilnya persentase alokasi anggaran juga diikuti oleh rendahnya pengelolaan dan pertanggungjawaban anggaran yang mendukung tumbuh dan berkembangnya inovasi, persentasenya hanya sebesar 54 persen.

Selanjutnya tidak semua inovasi memiliki unit khusus yang didedikasikan

untuk pengembangan inovasi, hanya terdapat 69 persen inovasi yang memiliki unit/ tim khusus. Strategi manajemen risiko sudah dilakukan oleh 85 persen inovasi. Tingginya ketersediaan manajemen risiko tidak berbanding lurus dengan tingkat pemanfaatan data, informasi dan pengetahuan terkait kinerja inovasi. Hanya 54 persen inovasi pemenang kompetisi inovasi pelayanan publik Kota Malang tahun 2019 yang memanfaatkan data/ inovasi sebagai basis pengembangannya. Bahkan lebih jauh diketahui data/ informasi yang berkaitan dengan kinerja inovasi belum terkelola dan terdokumentasi dengan baik. Hanya sebesar 69 persen inovasi yang memiliki legalitas dalam keberlangsungannya.

Terakhir, kepemimpinan pro-inovasi. Studi ini menunjukkan tingginya tingkat keberpihakan pemimpin terhadap inovasi. 92 persen informan menyatakan bahwa pemimpinnya sangat pro terhadap inovasi. Temuan menarik muncul dalam studi ini, hasil studi menunjukkan tidak ada korelasi antara kepemimpinan yang pro-inovasi terhadap keberlanjutan inovasi. Karena dari keempat inovasi yang mengalami stagnasi semuanya menyatakan adanya keberpihakan pemimpin dalam keberlangsungan inovasi.

Temuan lain justru membuktikan adanya interdependensi antara jenis inovasi berdasarkan aspek operasionalnya dengan keberlanjutan inovasi. Rata-rata inovasi yang mengalami stagnasi oprasionalnya masih berlangsung secara konvensional (non digital), sistem yang dijalankan inilah yang kemudian menjadi kendala dalam keberlangsungan inovasi. Sebagian besar inovasi jenis non digital mengalami kesulitan untuk dapat beradaptasi terutama di masa pandemi seperti saat ini. Walaupun memang tidak menutup kemungkinan hambatan dalam keberlanjutan inovasi juga terjadi pada inovasi jenis digital maupun *hybrid*. Kemungkinan ini akan muncul ketika tidak ada pengawalan, evaluasi dan

pengembangan terhadap aplikasi/layanan yang dihadirkan.

Studi yang dipublikasi OECD (2019:165) mengungkap adanya dua faktor lain yang dinilai penting mendorong lahir dan berkembangnya inovasi yaitu: pentingnya eksperimen (uji coba) inovasi dan pelibatan warga dalam tahapan inovasi. Merujuk pada studi ini maka dilakukan analisis terhadap uji coba dan pelibatan warga dalam tahapan inovasi pada 13 inovasi pemenang kompetisi inovasi pelayanan publik Kota Malang 2019. Hasilnya menunjukkan 92 persen PD melakukan uji coba terhadap masing-masing inovasi. Berikutnya didapati ke-13 inovasi (100 persen) melibatkan warga/ stakeholder dalam tahapan inovasi. Walaupun persentase uji coba dan pelibatan masyarakat dalam tahapan inovasi tinggi bahkan hampir sempurna namun tetap ada inovasi yang stagnan.

Dengan ini diidentifikasi penghambat berkembangnya inovasi daerah Kota Malang diantaranya; Pertama, rendahnya tingkat ketersediaan alokasi anggaran yang memadai dan pengelolaan dan pertanggungjawaban anggaran yang masih terbatas. Kedua, konsistensi dalam mengembangkan SDM pengelola inovasi masih rendah. Ketiga, minimnya pemanfaatan data, informasi, dan pengetahuan terkait kinerja inovasi. Keempat, tidak tersedianya unit khusus yang didedikasikan untuk terus mengembangkan inovasi. Kelima, aspek legal formal yang menjamin keberlangsungan inovasi belum tersedia.

SARAN

Kontribusi akademis dari studi ini adalah kemampuan studi ini dalam mengungkap faktor penghambat berkembangnya inovasi daerah di Kota Malang yang selama ini belum teridentifikasi dalam studi-studi terdahulu. Selain itu, riset ini memperluas kajian The Jawa Pos Institute of Pro-Otonomi (JPIP) 2007, 2012, dan studi

Organization for Economic Co-operation and Development, OECD) 2017. Adapun saran untuk mengembangkan kajian database dan keberlanjutan inovasi daerah adalah perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dengan teori dan instrumen berbeda guna memperluas kajian inovasi daerah khususnya di Kota Malang

DAFTAR PUSTAKA

- Hammersley dan Atkinson. (2007). *Ethnography: Principles in Practice*. Routledge
- Harrison. (2001). *E-Governance and Smart Communities: A Social Learning Challenge*. SAGE Publications
- Maggie Sumner dalam Jupp. (2006). *The SAGE Dictionary of Social Research Methods*. SAGE Publications
- OECD. (2017). *OECD Science, Technology and Industry Scoreboard 2017*. <https://www.oecd.org/sti/oecd-science-technology-and-industry-scoreboard-201725345.htm> diakses 13 Oktober 2020
- OECD. (2019). *Government at a Glance 2019*. <https://www.oecd.org/gov/government-at-a-glance-22214399.htm> diakses 13 Oktober 2020
- t'Hart dan Rhodes. (2014) *The Oxford Handbook of Political Leadership*. Oxford University Press
- Taufik, Tatang A. 2005. *Pengembangan Sistem Inovasi Daerah: Perspektif Kebijakan*. Jakarta: Pusat Pengkajian Kebijakan Teknologi Pengembangan Unggulan Daerah dan Peningkatan Kapasitas Masyarakat-BPPT.
- The Jawa Pos Institute of Pro-Otonomi (JPIP). (2007). Laporan penelitian JPIP untuk Otonomi Award 2017 Menganalisis Kondisi Inovasi Kabupaten dan Kota Di Jawa Timur yang Digagas Sejak Awal Pelaksanaan Otonomi Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah